

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2010-2016**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**Yayan Amroni
NPM. 1451010268**

Program Studi : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TA 1441 H / 2019 M**

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2010-2016**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Hanif, S.E.,M.M.
Pembimbing II : Fatih Fuadi, S.E.,M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

TA 1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Pemekaran wilayah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat setelah pemekaran wilayah mengalami fluktuasi naik turun. Pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Barat mengakibatkan terjadinya perubahan perekonomian wilayah yang dipengaruhi oleh pengeluaran daerah (PD), jumlah penduduk (JP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Barat. Pertama, pengeluaran daerah yang dikeluarkan akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap perekonomian yang akan memberi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, penduduk dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Ketiga, tingkat pembangunan manusia yang tinggi dilihat dari IPM sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat dengan menganalisis pengaruh PD, JP, IPM serta bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yaitu berupa data *time series* dengan rentan waktu 7 tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2016. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu Pengeluaran Daerah (X1), Jumlah Penduduk (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3). Variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi pustaka dan dokumentasi, data dianalisis menggunakan analisis *regresi linear berganda* dan uji beda *paired t-test*.

Berdasarkan hasil uji beda *paired t-test* nilai signifikansi diperoleh $0.352 > 0.05$ maka menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. variabel Pengeluaran Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat ditunjukkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($32.246 > 2.77645$) atau nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0.05% ($0.000 < 0,05$). Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat ditunjukkan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.874 < 2.77645$) atau nilai signifikan lebih besar dari alfa 0.05% ($0.446 > 0.05$). Variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3.416 < 2.77645$) atau nilai signifikan ($0.042 < 0.05$). Pengujian menggunakan uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran dikarenakan tidak terjadi peningkatan PDRB. Islam memandang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya PDRB, penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Kata kunci : pemekaran, pertumbuhan ekonomi.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp:0721-703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2010 – 2016**

Nama : **Yayan Amroni**
NPM : **1451010268**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


Hanif, S.E., M.M.

NIP. 197408232000031001

Pembimbing II,


Fatih Fuadi, S.E., M.Si.

NIP. 198512192015031006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah


Madnasir, S.E., M.Si.

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp:0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2010-2016** disusun oleh: **Yayan Amroni, NPM: 1451010268, Jurusan Ekonomi Syaria'ah,** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UTN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 31 Desember 2018.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Madnasir, S.E., M.Si.

Sekretaris : Liya Ermawati, S.E., MS.Ak.

Penguji I : Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M.

Penguji II : Hanif, S.E., M.M.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moh. Bahrudin, M.A.

NIDN. 19580824198903003

MOTTO

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-Qashash[28]:77).



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan barokah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis kecilku ini. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Supardi (Alm) dan Ibunda, Masyari yang selalu senantiasa berdo'a, mencurahkan kasih sayang yang tiada henti, memberi motivasi, menuntun langkahku dan dengan sabar menantikan keberhasilanku, sehingga menghantarkanku meraih gelar sarjana.
2. Abangku Surya Jitawan, Kakakku Edi Susanto, Adikku Irhan Dinata, Kaka Hastri, Nakan Kahutku Melva Aprilia Nantasya, Ravika Yulistia, Adara Fredela Azzahra, Serta Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, motivasi untuk tetap semangat menjalani aktifitas.
3. Serta Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yayan Amroni lahir di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Bapak Supardi (Alm) dan Ibu Masyari. Penulis yang akrab dipanggil Yayan ini berasal dari Liwa Lampung Barat, penulis memulai pendidikan dari sekolah dasar di SD Negeri 1 Kenali tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Belalau hingga tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Belalau hingga tahun 2014, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dengan Mengambil jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam hingga sekarang di UIN Raden Intan Lampung.

Sejak SMP hingga SMA aktif berorganisasi (Osis, Pramuka, Paskibra, Rohis) karena berorganisasi sudah menjadi bagian dari hobinya ia meneruskan saat kuliah. Organisasi yang pernah di ikuti ketika di perguruan tinggi baik internal maupun eksternal yaitu aktif sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Pencak Silat, dan organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Lampung Peduli Sesama (GLPS) serta Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Lampung Barat (PERMA LAMBAR).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Dialah dzat yang menggenggam setia nyawa setiap makhluk-Nya. Tanpa-nya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada pemimpin umat, nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM TAHUN 2010-2016”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Maka dari itu penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi, terkhusus saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Moh.Bahrudin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswanya.

2. Bapak Madnasir, S.E.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar
3. Bapak Hanif, S.E.,MM. dan Bapak Fatih Fuadi, S.E.,M.Si. selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Kepada seluruh dosen beserta staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
5. Orang tuaku, Kakakku, Adikku dan semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi untuk keberhasilanku.
6. Kekasihku Deta Iktaria, S.P. yang telah banyak membantu, mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku ekonomi islam 2014, yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka untuk dapat meraih gelar sarjana dan telah membantu baik dukungan moriil maupun material dalam penyelesaian skripsiku ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga allah SWT mencatatnya sebagai amal kebaikan dan selalu memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini

tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi akademik Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, amin.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Bandar Lampung, 26 November 2018

Penulis,

**Yayan Amroni
NPM.1451010268**



DAFTAR ISI

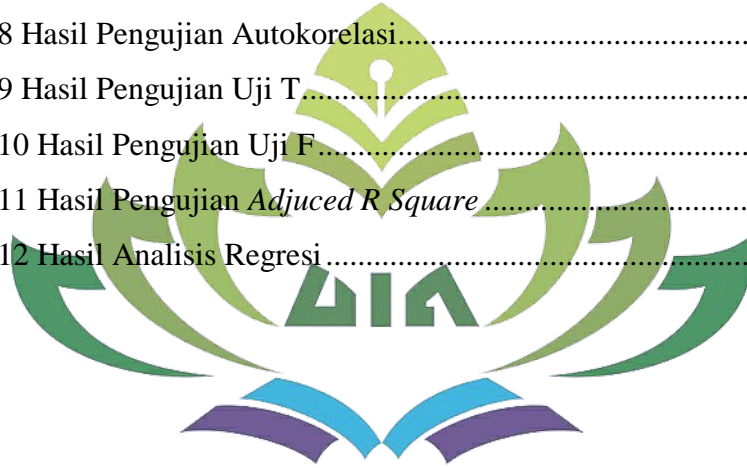
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	14
1. Pengertian Desentralisasi	14
2. Pengertian Otonomi Daerah.....	15
3. Tujuan Otonomi Daerah.....	16
B. Pemekaran Wilayah	17
1. Pengertian dan Latar Belakang Pemekaran Wilayah	17
2. Prinsip Pemekaran Wilayah	20
3. Tujuan Pemekaran Wilayah	22

4. Dampak Pemekaran Wilayah.....	23
C. Pertumbuhan Ekonomi.....	28
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	32
3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	33
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	35
5. Masalah Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	36
D. Pengeluaran Daerah.....	39
E. Jumlah Penduduk.....	40
F. Indeks Pembangunan Manusia.....	41
G. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Daerah (PD), Jumlah Penduduk (JP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	43
H. Penelitian Terdahulu.....	44
I. Kerangka Pemikiran.....	47
J. Hipotesis.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	50
B. Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Populasi dan Sample.....	53
E. Variabel Penelitian.....	54
F. Definisi Operasional Variabel.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Hasil Penelitian.....	66
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	66
2. Sejarah Kabupaten Lampung Barat.....	67
3. Geografis dan Topografi Kabupaten Lampung Barat.....	69
4. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.....	70

B. Analisis Data	71
1. Analisis Deskriptif.....	71
2. Uji Beda.....	77
3. Uji Asumsi Klasik	78
4. Uji Hipotesis.....	83
5. Koefisien Determinasi.....	85
6. Analisis Regresi Linear Berganda.....	86
C. Pembahasan.....	88
1. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat	88
2. Pengaruh Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, IPM Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat	90
3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam	98
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	57
Tabel 4.1 Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Barat	72
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat	73
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat	75
Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lampung Barat	77
Tabel 4.5 <i>Paired Sample Test</i>	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	79
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	80
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	81
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Uji T.....	83
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Uji F.....	84
Tabel 4.11 Hasil Pengujian <i>Adjusted R Square</i>	85
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi.....	87



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 – 2016.....	11
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 4.1 Pertumbuhan Pengeluaran Daerah (PD) Kabupaten Lampung Barat	72
Gambar 4.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk (JP) kabupaten Lampung Barat	74
Gambar 4.3 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Barat.....	76
Gambar 4.4 Heterokedastisitas.....	82
Gambar 4.5 Grafik Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Barat	100



DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Pengeluaran Daerah (PD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2016
2. Data Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2016
3. Data Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2016
4. Data Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2016
5. Hasil Uji Beda
6. Hasil Uji Beda Pertumbuhan Ekonomi
7. Hasil Uji Beda Pengeluaran Daerah
8. Hasil Uji Beda Jumlah Penduduk
9. Hasil Uji Beda Indeks Pertumbuhan Manusia
10. Uji Normalitas
11. Uji Multikolinearitas
12. Uji Autokorelasi
13. Heteroskedastisitas
14. Uji T
15. Uji F
16. Koefisien Determinasi
17. Analisis Regresi Linear Berganda
18. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penelitian ini berjudul **“ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2010-2016 (Studi Kasus Kabupaten Lampung Barat).**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Analisis** merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dapat pula diartikan sebagai tinjauan, ulasan dan pembahasan¹.
2. **Dampak** adalah akibat atau imbas yang terjadi baik itu negatif atau positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.²

¹Kamus besar bahasa Indonesia” (On-line), tersedia di <http://kbbi.web.id/arti-kata/analisis.html> di akses pada kamis 22 maret 2018 : 13.00 WIB.

²*Ibid.*

3. **Pemekaran wilayah**, pemekaran berasal dari kata “MEKAR” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak. Sedangkan Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Jadi pemekaran wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah atau daerah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.³
4. **Pertumbuhan ekonomi** merupakan suatu alat pengukur prestasi dari suatu perkembangan perekonomian.⁴ Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian.⁵
5. **Perspektif** adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.⁶

³Murniati. 2017. Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita di Kabupaten Kerinci. J.mas vol 2 No 1.

⁴Sukirno, S. *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 423.

⁵Mankiw, N.G. *Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm 174.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm.1062

6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan Sunnah.⁷

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penyelidikan dampak kebijakan pemekaran suatu wilayah terhadap prestasi dari suatu perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah dilakukan pemekaran wilayah dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam.

B. Alasan memilih judul

Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

1. Alasan Objektif

Pemekaran wilayah marak terjadi pasca ditentukannya Undang-Undang otonomi daerah. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan struktur ekonomi secara menyeluruh, yang meliputi: pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek ekonomi, seyogyanya dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013), hlm..62-63.

Pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dapat dicerminkan dari perubahan PDRB, pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan IPM disuatu daerah dalam periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pemekaran wilayah telah terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah hasil pemekaran. Lepasnya Pesisir Barat dari pemerintahan induknya yang membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan sumber-sumber daya dalam perekonomian wilayah, perubahan jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.

2. Alasan subjektif

Pemekaran wilayah dalam realitasnya akan memberikan pembangunan yang lebih baik dan berdampak terhadap pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan di daerah tersebut. Hal ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian bidang Ekonomi Islam. Judul yang diangkat juga ada kaitannya dengan jurusan Ekonomi Islam. Selain itu, penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia di perpustakaan atau sumber lainnya seperti, jurnal, artikel, dan data yang diperlukan.

C. Latar belakang Masalah

Pasca runtuhnya rezim Orde baru yang 32 tahun lamanya berkuasa menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula pola hubungan pemerintah pusat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Wujud desentralistik dalam praktiknya yaitu pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.⁸ Wujud desentralistik yaitu salah satunya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah Indonesia, merupakan hal yang di amanatkan oleh Undang-Undang tentang pembentukan wilayah administratif baru ditingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten berdasarkan UU No 22 tahun 1999 yang kemudian secara normatif direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 pemekaran wilayah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.⁹

Pembentukan suatu daerah dalam struktur Negara Indonesia, pada dasarnya sebagai subsistem yang dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.¹⁰ Hal inilah yang menjadikan pemekaran wilayah sebagai konsep otonomi daerah yang menekan pada aspek pelayanan

⁸Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Malang: CV. Cita Intrans Laras Wisma Kalimetro, 2016), hlm.7

⁹Kaputra Iswan dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm.208.

¹⁰Marbun, B.N, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 109.

pemerintahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, dan juga sebagai dasar pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Pembangunan daerah juga dipandang sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengelola sumber daya dan peluang yang ada sehingga membentuk pola kemitraan diantara keduanya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.¹¹ Hal ini disebabkan karena faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah penduduk. Penduduk sebagai sumber daya yang menyediakan modal manusia dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi aktif dari masyarakat akan mempercepat pembangunan suatu wilayah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap wilayah tersebut yang didukung oleh kinerja ekonomi yang lebih baik. Dalam hal ini Islam memandang pentingnya tolong-menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Ayat 2 yang berbunyi :

عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

¹¹Edy Suandi Hamid. *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi* (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 160.

Selain itu juga, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Semakin banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Namun diharapkan kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT seperti dijelaskan pada firman Allah SWT QS. A-Maidah (49 : 5):



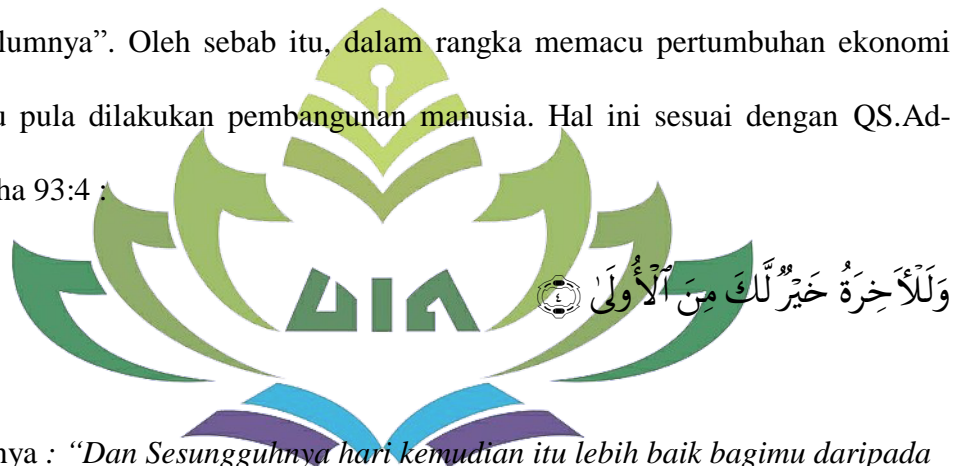
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”

Ayat diatas menyerukan kepada pemimpin agar memutuskan suatu kebijakan hendaklah berdasarkan petunjuk Allah, karena dengan demikian

masyarakat akan merasakan arti dari sebuah naungan dalam suatu kepemimpinan dalam Islam. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka pemerintah dengan mudah untuk menangani masalah masyarakat terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemekaran wilayah adalah cara dari pemerintah untuk mempersempit ruang lingkup guna untuk memudahkan pemerintah memantau kondisi perekonomian masyarakat.

Pemekaran wilayah juga erat kaitannya dengan pembangunan, dalam Islam pembangunan disebutkan sebagai “keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya”. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan QS.Ad-Dhuha 93:4 :



Artinya : “Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)”

Dari ayat tersebut dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran dalam membangun sesuatu harus memiliki tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia UNDP (*United Nation Development Programme*), telah menerbitkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Disamping itu, Islam juga memandang pertumbuhan ekonomi harus memasukkan aspek akseologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan aspek ruhaniyah. Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melalui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan distribusi yang merata. Namun demikian, yang lebih baik dari keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata.

Pemekaran wilayah baru-baru ini terjadi di Provinsi Lampung yaitu di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat dibagian ujung Barat dari Provinsi Lampung. Pembentukan Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak tahun 1997. Kabupaten Lampung Barat dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah hasil pemekaran. Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah Kabupaten termuda di Provinsi Lampung hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231

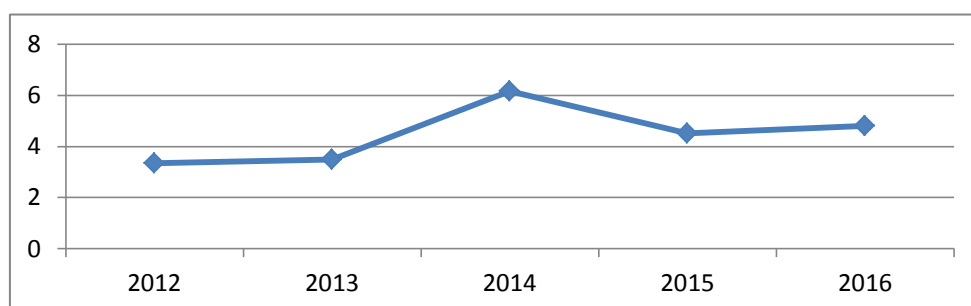
dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5364) yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012.

Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan struktur ekonomi secara menyeluruh, yang meliputi : pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek ekonomi, seyogyanya dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB disuatu daerah dalam periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Lepasnya Pesisir Barat dari pemerintahan induknya yang membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan sumber-sumber daya dalam perekonomian wilayah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat berakibat pada berkurangnya luas wilayah, termasuk potensi pendapatan, namun berdasarkan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat, kondisi perekonomian Tahun 2016 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi berada pada 5,50 %, jika dilihat selama

kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat cenderung mengalami naik turun setelah mengalami pemekaran terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2012 – 2016



Sumber : Data Sekunder, *Bappeda Kabupaten Lampung Barat*

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016**” dengan menganalisis pengaruh pengeluaran daerah, jumlah penduduk, IPM, dan dummy terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif Ekonomi Islam tahun 2010-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran?

2. Apakah pengeluaran daerah, jumlah penduduk, IPM sebelum dan sesudah pemekaran wilayah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat?
3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, IPM sebelum dan sesudah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.
- c. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis :
 - 1) Menambah wawasan mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

- 2) Memberikan bahan informasi ilmiah penelitian yang mengkaji otonomi daerah, pemekaran wilayah dan pendapatan perkapita yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai persoalan pemerintah daerah.
 - 3) Memberikan tambahan bahan kajian atau literatur dalam ekonomi Islam.
- b. Manfaat praktis
- 1) Bagi peneliti : Untuk menambah wawasan tentang dampak pemekaran wilayah, serta dapat mengaplikasikan teori-teor yang ada.
 - 2) Bagi akademik : Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap daerahnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya.
 - 3) Bagi pemerintah : Sebagai bahan pemikiran serta pertimbangan pemerintah terhadap masyarakat didaerah dalam mengeluarkan kebijakan pemekaran suatu wilayah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Pengertian Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kewenangan yang diserahkan tersebut, mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.¹²

Desentralisasi dapat memberi sisi positif dalam pelaksanaan pemerintahan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah pusat desentralisasi tentu akan menjadi jalan yang mengurangi beban pusat.
2. Program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak diwujudkan akan lebih realistis, lebih mengena dan lebih dekat dengan kebutuhan lokal.
3. Memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk belajar mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan demikian belajar untuk bisa menangkap dan merumuskan aspirasi masyarakat setempat.

¹² Saragih, J.P., *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* (Jakarta: Halia Indonesia, 2003)

4. Dengan adanya pemberian kewenangan maka berarti akan membuka peluang bagi keterlibatan rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan.¹³

2. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini ternyata tidak berbeda dengan pasal 1 huruf c UU No.32 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “Otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.

R.D.H. Koesomahatmadja berpendapat bahwa dengan diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti provinsi dan kabupaten/kota, maka daerah

¹³Agusniar, A, “*Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Singkil*” (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Pertanian, Bogor, 2006).

tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya. Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : Pertama, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya. Kedua, menyelenggarakan kepentingan–kepentingan umum.

Pengertian otonomi menurut UU No. 32 tahun 2004 dibedakan dengan pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi mengandung unsur “kewenangan untuk mengatur” atau dengan kata lain terkandung juga pengertian kemandirian. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak dan wewenang.

3. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah, berdasarkan pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.¹⁴Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas asas desentralisasi.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 2 Ayat (3).

Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004:

- a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah . disamping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.
- b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah.

B. Pemekaran Wilayah

1. Pengertian dan Latar Belakang

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya, landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di indonesia adalah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945

tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”. Menurut peraturan pemerintah No 78 tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.

Menurut peraturan pemerintah No 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang sersu antara pusat dan daerah

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

2. Prinsip pemekaran wilayah

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas *built-up areanya* dapat diartikan semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja.¹⁵

Semakin meningkatnya kegiatan ekonomi mulai dari pusat bisnis (*Central Business District* atau CBD) yang cenderung berkembang kearah luar, baik secara difusif maupun secara lompatan katak (*leaf frog*), mengakibatkan tumbuhnya kota-kota satelit sebagai lokasi pemukiman baru. Oleh karena sebuah pemukiman kota baru atau kota satelit sukar membutuhkan luas tanah yang besar dan di dalam wilayah kota sendiri ketersediaan tanah semakin terbatas dan cenderung sangat mahal, maka lokasi kota-kota baru tersebut akan menyebar diluar wilayah kota asalnya. Proses inilah yang kemudian menyebabkan wilayah administratif tetangganya memperoleh manfaat dengan semakin berkembangnya daerah perbatasannya.

¹⁵Harmantyo, Dj. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah, dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia, <http://geografi.ui.ac.id>. 2011. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB.

Apapun alasannya, pemekaran daerah harus mengutamakan serta mengedepankan kesejahteraan rakyat.¹⁶ Alasan-alasan pemekaran wilayah adalah :

1. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim.

2. Alasan Historis

Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu.

3. Alasan Kultural atau budaya (etnis)

Pemekaran wilayah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.

4. Alasan ekonomi

Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

5. Alasan anggaran

Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).

6. Alasan keadilan

¹⁶Anonim.Enam Alasan Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom.<http://phylopop.com>. 2012. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 14.00 WIB.

Pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

3. Tujuan pemekaran wilayah

Tujuan yang relevan dengan pemekaran daerah adalah untuk : 1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, 2) memperkuat basis ekonomi rakyat, 3) mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, 4) membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan 5) memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung.¹⁷

Kebijakan yang banyak di atur dalam regulasi yang ada selama ini adalah kebijakan tentang pemekaran daerah. Rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui 1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 3) percepatan pelaksanaan pembangunan

¹⁷ Gulo, M.R. Memahami dengan Benar Tujuan Pemekaran. <http://niasbaratwordpress.com>. 2007. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 14.30 WIB.

perekonomian daerah, 4) percepatan pengelolaan potensi daerah, dan 5) peningkatan keamanan dan ketertiban.¹⁸

4. Dampak Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah berimplikasi pada segala aspek kehidupan. Dampak-dampak pemekaran wilayah meliputi hal-hal sebagai berikut¹⁹ :

1. Dampak Sosio Kultural

Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat.

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas

¹⁸Khalid, TM. Otonomi Daerah: tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah. <http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>. 2012. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.00 WIB.

¹⁹Supra catatan kaki nomor 19.

wilayah, juga sering berimplikasi pada ketegangan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

2. Dampak pada pelayanan publik

Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibu kota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan dibawahnya. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.

Pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh alokasi DAU dalam posisi sebagai daerah otonom baru.

3. Dampak bagi pembangunan ekonomi

Pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infarastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah otonom baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir apabila akselerasi pembangunan ekonomi daerah bisa dilakukan tanpa menghadirkan pemerintah daerah otonom baru melalui kebijakan pemekaran daerah. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan harga yang murah. Namun, dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang

meyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukan tanpa kehadiran pemerintah daerah otonom.

4. Dampak pada pertahanan, keamanan dan integrasi Nasional

Pembentukan DOB bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan dengan Negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran 'Indonesia' terutama ditandai dengan kehadiran tentra atas nama pengendalian terhadap gerakan separatis. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki penanganan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

Tetapi, kehadiran pemerintah DOB ini harus dibayar dengan ongkos ekonomi yang mahal, terutama dalam bentuk belanja aparat dan operasional lainnya. Selain itu seringkali ongkos politiknya juga bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan pasca pemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada beberapa daerah hasil pemekaran, ketidakmampuan untuk membangun inklusifitas politik antar kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar. Untuk mempersiapkan upaya pemekaran ini, proses pemekaran unit pemerintahan terbawah, seperti desa untuk

pemekaran kabupaten dan pemekaran kabupaten untuk pemekaran provinsi, merupakan masalah baru yang perlu diperhatikan.

Hasil evaluasi pemekaran wilayah menunjukkan bahwa dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu : pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi.²⁰

Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil studi menunjukkan bahwa daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah pemekaran telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.

Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk meskipun kesejahteraan DOB telah relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Dari sisi ekonomi ketertinggalan DOB terhadap daerah induk maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung bergeraknya perekonomian melalui investasi publik.

²⁰Darmawan, Nazara, S., Jackson, D., Ahmad, T. dan Purwanto, D.A. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP). 2008. <http://undp.or.id>. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.30 WIB.

C. Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen : pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.²¹

Pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.²² Pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan.

²¹Jhingan, ML., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

²²Setiawan, Iwan, “*Analisis Akses Desa-Desa di Kabupaten Bandung Terhadap sumber-SumberProduktif*”. (Laporan Penelitian UNPAD, Bandung, 2006).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dalam hal ini berkaitan dengan *output* total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah *output* total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, kenaikan output perkapita harus dianalisis dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain, pertumbuhan ekonomi mencakup (GDP) total dan pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi regional menyangkut perkembangan berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi (*output*) dan pendapatan. Ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap Negara, ketiga faktor tersebut adalah ²³:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu Negara, yaitu :

²³Todaro, M.P., dan Smith, S. C. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006). h. 92.

- a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
- b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal yang ada.

Ada beberapa yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : peranan sistem pasaran bebas, perluasan pasar, spesialisasi dan kemajuan teknologi. Menurut pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan dimana adakalanya mengalami perkembangan dan adakalanya mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) yang melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi, maka perlu dilakukan investasi sehingga dengan adanya investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.²⁴

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Banyak terdapat definisi tentang pembangunan ekonomi. Dari tinjauan tentang pengertian pembangunan ekonomi yang diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu

²⁴Pressman, Steven, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 155.

masyarakat mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung unsur yaitu :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terus menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi.
2. Usaha peningkatan pendapatan.
3. Berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harod - Domar, menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harod - Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal-hal berikut:

- a) Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat *full employment*.
- b) Perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga (konsumen) dan sektor perusahaan (produsen).
- c) Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan.
- d) Hasrat menabung batas (*Marginal Propensity to Save*) besarnya tetap.

Sehingga menurut Harod-Domar pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh (*full capacity*) dalam jangka panjang.

2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini sesuai dengan proses ideologis Negara yang bersangkutan.²⁵ Sementara itu, Kuznets menunjukkan 6 ciri dari pertumbuhan ekonomi²⁶:

1. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk perkapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat.
2. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari semakin meningkatnya laju pendapatan perkapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input.
3. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri jasa.

²⁵Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edke-10, Cet ke-10. Terjemahan dari Judul Asli "The Economics of Debelopment and Planning", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

²⁶ *Ibid*

4. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke perkotaan.
5. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya ekspansi Negara maju dan adanya kekuatan dalam hubungan internasional.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai suatu proses dimana Produk Domestik Regional Bruto rill perkapita meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas perkapita.²⁷ Sasaran berupa kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan rill perkapita merupakan tujuan utama yang perlu dicapai melalui penyediaan dan pengalihan sumber-sumber produksi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu : proses, output perkapita dan jangka panjang yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu alat pengukur prestasi dari suatu perkembangan perekonomian.²⁸

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Wilayah dapat diketahui melalui beberapa indikator pembangunan ekonomi yang dapat dilihat melalui statistik pendapatan regional secara berkala. Dari data statistik tersebut nantinya

²⁷Salvatore, D. *Ekonomi Internasional*. Ed-ke-5, Cet ke-1, Terjemahan dari judul Asli "International Economies". Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1997.

²⁸Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 423

akan diketahui : (1) tingkat pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam PDRB harga konstan, dimana akan menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah, baik secara menyeluruh maupun persektor (2) tingkat kemakmuran daerah, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah perlu dilakukan perbandingan dengan daerah lain, sedangkan untuk mengetahui perkembangannya melalui pendapatan perkapita secara berkala, (3) tingkat inflasi dan deflasi (4) gambaran struktur perekonomian yang dapat diketahui melalui sumbangan dari masing-masing sektor pembangunan terhadap PDRB.²⁹

Agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suatu strategis pembangunan yang tepat. Program pembangunan di kebanyakan negara sedang berkembang sering lebih direkankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif, hal ini dimaksud guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa sehingga PDRB negara/daerah tersebut juga meningkat. Oleh karena itu salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian.³⁰

²⁹ Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM Yogyakarta, 2010).

³⁰ *Ibid.*

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa faktor yang dipandang sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah : tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat dan luas pasar.³¹ Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap Negara. Ketiga faktor tersebut adalah³²:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja
 Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.
3. Kemajuan teknologi
 Kemajuan teknologi merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuk yang paling sederhana,

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

kemajuan teknologi disebabkan cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan kegiatan-kegiatan tradisional.

4. Masalah ekonomi dalam perspektif ekonomi islam

Walaupun ekonomi islam memahami manusia dengan kebutuhan yang sifatnya terbatas, dan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya tanpa batas namun bukan tanpa masalah. Dalam rangka upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara lahiriah, maupun secara bathiniah, dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun masalah ekonomi yang menjadi sorotan ekonomi islam adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan ekonomi

a. Individu dengan individu

Individu dengan individu yaitu lahir sebagai akibat keserakahan individu yang lebih kuat, dan lebih mampu dalam banyak aspek, sehingga menimbulkan eksploitasi sumber daya yang tidak seimbang. Dengan tanpa peduli mereka yang kuat makin menguasai sumber daya yang ada, sementara mereka yang lemah menjadi korban. Disini hak dari masing-masing individu tidak terwujud dengan baik.

b. Kelompok dengan kelompok

Kelompok dengan kelompok yaitu sekelompok orang-orang kuat, membangun kerjasama dalam bisnis, maupun

organisasi tertentu, supaya lebih kuat lagi dalam menguasai sumber daya ekonomi dengan tanpa peduli terhadap kelompok lemah lain yang jumlahnya lebih banyak. Maka lahirlah kesenjangan yang makin melemahkan kelompok yang lemah.

c. Sektor dengan sektor

Sektor dengan sektor yaitu ketimpangan yang terjadi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ketimpangan kelompok, dimana sektor yang kuat (industri) yang dikelola dengan teknologi maju berhadapan dengan sektor yang lemah yang dikelola secara tradisional atau memiliki ketergantungan dengan sektor yang kuat. Nilai dan harga diri produksi yang dihasilkan sangat mencolok perbedaannya, dengan posisi tawar yang sangat lemah bagi sektor yang lemah. Ketimpangan sektor inilah yang banyak membawa kemelaratan umat manusia, dimana mereka yang berada di sektor lemah sangat sulit untuk bangkit.

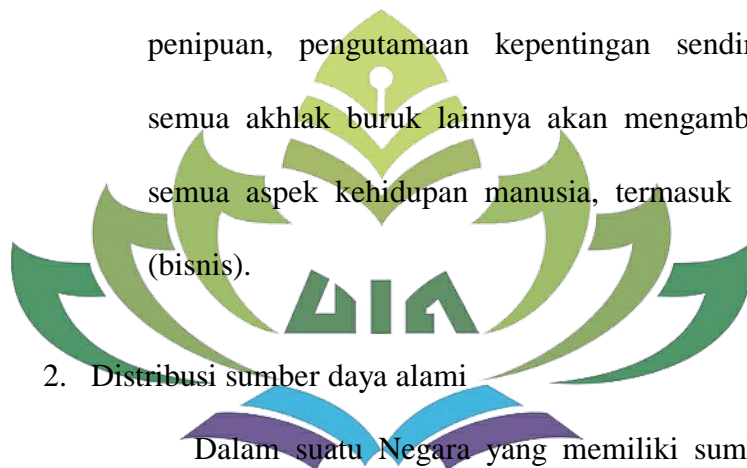
d. Wilayah dengan wilayah

Setiap wilayah baik secara alamiah, kultural maupun struktural banyak memiliki perbedaan. Apabila perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka lahirlah wilayah yang kuat dan dapat mengeksploitasi wilayah lebih lemah.

Kenyataan seperti ini bisa terjadi secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.

e. Akhlak ekonomi manusia

Sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia lahir kebumi dengan dua sisi, ada sisi malaikat dan sisi hewaniyah. Bila sisi hewaniyah yang diperturutkan oleh manusia maka yang muncul adalah naluri hewan yang tidak mengenal aturan sehingga nafsulah yang diikuti. Pemerasan, pemalsuan, penipuan, pengutamaan kepentingan sendiri (egois) dan semua akhlak buruk lainnya akan mengambil peran dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi (bisnis).



2. Distribusi sumber daya alami

Dalam suatu Negara yang memiliki sumber daya alam, dalam bentuk hasil laut, hasil hutan, dan beraneka hasil tambang, sesungguhnya adalah milik rakyat, karena itu harus diolah, dimanfaatkan atau dijual untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat atau keluarga dan kelompok pejabat. Masalah distribusi sumber daya alam semakin memperbesar kemiskinan sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik. Dan ekonomi memiliki konsep yang jelas, bagaimana mengelola sumber daya alam milik rakyat, bukan milik Negara.

3. Pengelolaan ekonomi umat

Ekonomi umat adalah ekonomi yang berlandaskan berdasarkan persaudaraan yang berarti segala sesuatu dapat diselesaikan secara ikhlas, damai dan saling menguntungkan laksana orang yang bersaudara dalam satu keluarga besar, yang penuh kasih sayang diantara semua keluarga, dengan demikian akan jauh dari perbuatan yang merugikan, mencelakakan dan membawa penderitaan bagi sesama saudara. Masalah ekonomi umat masih sangat memprihatinkan karena tingginya pemerasan antara satu dengan yang lain, yang menimbulkan kemiskinan yang berkepanjangan.

D. Pengeluaran Daerah

Menurut UU No.33 Tahun 2004 belanja daerah/pengeluaran pemerintah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Berdasarkan sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

Pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Pengeluaran

pemerintah pada APBN dan APBD pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ekonomi, jika pendapatan perkapita meingkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga meningkat, terutama pengeluaran pemerintah untuk mengatur hubungan dalam masyarakat seperti hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Kebijakan ini dikaitkan dengan prasaranan pemerintah sebagai penyedia barang publik. Semakin banyak pengeluaran pemerintah daerah yang tidak produktif, maka semakin kecil tingkat pertumbuhan perekonomian daerah.³³

E. Jumlah Penduduk

Penduduk termasuk bagian penting dalam perekonomian karena penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan menyediakan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif dan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik.³⁴ Namun patut dipertanyakan apakah cepatnya pertumbuhan penawaran tenaga kerja akan memberikan efek positif atau negatif terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini tergantung sepenuhnya pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap secara produktif memanfaatkan tamabahan tenaga kerja tersebut.

³³ Halim Abdul, Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012).

³⁴ *Ibid*, h, 93.

Terdapat 2 ciri penting dari sifat penduduk di negara-negara berkembang yang menimbulkan efek buruk kepada usaha pembangunan yaitu pertama, di beberapa negara jumlah penduduknya relatif besar dan yang kedua, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk relatif cepat. Disatu pihak negara-negara tersebut memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang terbatas dalam pembangunan ekonomi, namun di lain pihak, mereka harus mewujudkan kesempatan kerja dan berusaha menaikkan kemakmuran untuk sebagian besar penduduk dunia yang bertambah.³⁵

Pertumbuhan penduduk yang cepat makin menambah kerumitan dalam usaha-usaha pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Karena di satu pihak pertumbuhan penduduk yang cepat akan menambah jumlah tenaga kerja, namun di lain pihak negara tersebut mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja sehingga timbul masalah pengangguran yang sangat serius dan masalah urbanisasi dan akhirnya berdampak terhadap perekonomian daerah tersebut.³⁶

F. Indeks Pembangunan Manusia

Ramirez berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan

³⁵ Sukirno, Sudono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT Raka Grafindo Persada, 2006).

³⁶ Sardi, Analisis Pengaruh Pengeluaran dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh, (Medan : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2012).

manusia (human development).³⁷ Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ketiga komponen : capaian umur panjang, dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan. Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan *human capital* dalam rangka untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.³⁸

³⁷ Sasana, H., "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang (2009), h.17.

³⁸ Maiharyanti, Eva, "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam", Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2010).

G. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Daerah (PD), Jumlah Penduduk (JP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran daerah dapat dilihat dari pernyataan Mankiw yang dikutip dalam Riyad menyatakan bahwa Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari nilai PDRB yang merupakan nilai total pengeluaran setiap unit ekonomi dimana salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap perekonomian yang akan memberi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁹

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk dan IPM dapat dilihat dari pernyataan Todaro dan Smith bahwa besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk dan tingkat keahliannya saja, namun juga meliputi pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap-sikap atau penilaian mereka terhadap suatu pekerjaan, akses dan besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara otonom.⁴⁰

³⁹ Avicenna S Hidayat, Frederic Winston Nalle, Aalisis pengaruh belanja pemerintah, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 15 No. 01 (Juni 2017).

⁴⁰ Todaro, M.P., dan Smith, S. C. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

H. Penelitian Terdahulu

Evaluasi pemekaran wilayah Indonesia dengan studi kasus Kabupaten Lahat harus menggunakan analisis *pola spasial*. Pola spasial tersebut bertujuan untuk menentukan pembagian wilayah, dimana hasil pola spasial pertama yang diperoleh berdasarkan kriteria fisik/lingkungan, menghasilkan dua wilayah pemekaran, yaitu wilayah I (9 kecamatan) dan wilayah II (10 kecamatan), kemudian dari hasil pola spasial kedua berdasarkan kriteria ekonomi, menghasilkan dua wilayah pemekaran, yaitu wilayah I (8 kecamatan) dan wilayah II (11 kecamatan), dan dari pola spasial ketiga berdasarkan kriteria sosial, menghasilkan tiga wilayah pemekaran, yaitu wilayah I (6 kecamatan) wilayah II (6 kecamatan) dan wilayah III (7 kecamatan).⁴¹

Melihat ukuran optimal pemerintah daerah di Indonesia dengan studi kasus pemekaran wilayah Kabupaten/kota dalam era desentralisasi yaitu harus menggunakan analisis *Ordinary Least Square* (OLS). Dimana hasil regresi persamaan-persamaan yang dilakukannya dengan menggunakan fungsi kuadratik menunjukkan bahwa semua variabel (selain beberapa *dummy*) signifikan dan konsisten dalam memengaruhi pengeluaran pemerintah perkapita, baik untuk pengeluaran total, pengeluaran rutin, maupun pengeluaran pembangunannya. Dalam penelitian yang dilakukannya juga

⁴¹Khairullah, "Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat". *Jurnal Ekonomi Pembanguna*, Vol. 11 No. 3 (3 Desember 2006), h. 261-277.

terdapat hubungan negatif yang signifikan antara jumlah penduduk maka semakin kecil pula pengeluaran pemerintah perkapitanya.⁴²

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Studi Komparatif : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat) periode 1975-2007, menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan dan nilai tambah industri (besar/sedang) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat. Variabel pengeluaran pemerintah mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dibanding dengan variabel pendidikan, dan variabel nilai tambah industri.⁴³

Analisis pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1969-2009. Menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan Indonesia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi, sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak signifikan berpengaruh. Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran

⁴²Suahasil Nazara, "Ukuran Optimal Pemerintah daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Dalam era Desentralisasi". *Jurnal ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. VII No. 02 (Januari 2007), h. 129-157.

⁴³Junawi Hartasi Saragih, "Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Studi Komparatif : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat)". (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), h.76.

pemerintah atas kesehatan tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka panjang dan jangka pendek. Proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi hanya berkisar antara 3-7 persen pada tahun 1969-1996, kemudian mulai meningkat tajam sejak tahun 1998.⁴⁴

Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita, kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua dengan menggunakan analisis *t-test equal mean*.⁴⁵ Hasil dari variabel yang diuji menunjukkan tiga kondisi, yaitu pertama: dihitung dari rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita sebelum pemekaran yakni periode 1999-2002 sebesar 8.32 persen per tahun, kemudian apabila dibandingkan dengan masa sesudah pemekaran yaitu periode 2003-2008 menurun menjadi 0,70 persen per tahun, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemekaran daerah membuat pendapatan perkapita di Provinsi Papua menjadi lebih lambat. Kedua: setelah terjadi pemekaran maka persentase penduduk miskin cenderung menurun, yang ditandai pada tahun 1999 persentase penduduk miskin dikota sebesar 9.09 persen, kemudian pada tahun 2008 menurun menjadi 7.02 persen. Dan ketiga: secara statistik kebijakan pemekaran wilayah dianggap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah.

⁴⁴Desi Dwi Bastias, "Analisis pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1969-2009". (Skripsi Program sarjana fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), h. 121.

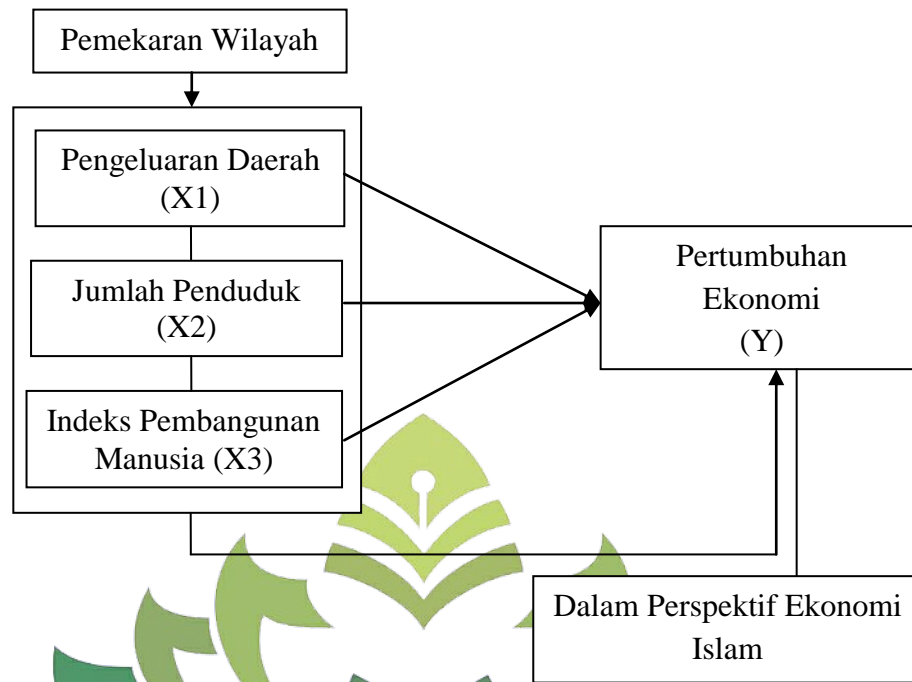
⁴⁵ Ida Ayu Purba Riani dan M. Pudjihardjo, "Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita, kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua". *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 12 No.1 (1 Februari 2012), h. 127-148.

I. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana teori yang telah dikemukakan diatas, pemekaran wilayah akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan hidup kepada masyarakat melalui kenaikan pendapatan perperkapita sebagai salah satunya. Keberhasilan dari suatu pemekaran wilayah secara umum ditandai dengan terciptanya kondisi yang lebih baik setelah pemekaran dibanding sebelum pemekaran. Dari pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadaan perekonomian wilayah yang dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Lampung Barat dan faktor yang mempengaruhinya.

Faktor yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pengeluaran daerah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Dimana pengeluaran daerah merupakan cerminan dari tingkat kemampuan daerah dalam membangun daerahnya melalui belanja daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi ditambah lagi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Konsep teori tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi, baik sebelum pemekaran maupun sesudah pemekaran wilayah. Apabila pertumbuhan ekonomi setelah pemekaran lebih tinggi maka dinyatakan berhasil, akan tetapi apabila pertumbuhan ekonomi lebih rendah maka suatu pemekaran itu dinyatakan tidak berhasil.

J. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan penelitian, dan dari berbagai hasil kajian empiris yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_{01} : Tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat sesudah pemekaran
2. H_1 : Terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat sesudah pemekaran
3. H_{02} : Pengeluaran daerah sebelum dan sesudah pemekaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
4. H_2 : Pengeluaran daerah sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
5. H_{03} : Jumlah penduduk sebelum dan sesudah pemekaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
6. H_3 : Jumlah penduduk sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
7. H_{04} : Indeks Pembangunan Manusia Jumlah sebelum dan sesudah pemekaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
8. H_4 : Indeks Pembangunan Manusia sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
9. H_{05} : Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia sebelum dan sesudah pemekaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
10. H_5 : Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.⁴⁶

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “*field research*”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan gambaran tentang dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat yang menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikanya.

Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat,

⁴⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011), h.97.

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.

B. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka secara sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya.⁴⁸ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif ekonomi Islam.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan dan lain sebagainya.⁴⁹ Dalam hal ini, penulis menggunakan data *time series* (runtut waktu) yang diperoleh dari instansi, dinas-dinas, juga penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data yang tersedia di BPS Kabupaten Lampung Barat, yaitu data tentang pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDRB Kabupaten Lampung Barat dan data tentang faktor-faktor yang

⁴⁷ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.47.

⁴⁸ Joko subagyo, *Op.Cit*, h. 97.

⁴⁹ V Wiranata Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.75.

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berupa data pengeluaran daerah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan variabel dummy sebelum dan sesudah. Data penelitian meliputi data sebelum pemekaran (2010-2012), sedangkan data setelah pemekaran digunakan data mulai tahun 2013-2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵⁰ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan dilapangan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat sebagai bukti atau fakta penelitian yang sangat kuat. Pengamatan langsung ini dilakukan terhadap keadaan dan proses kegiatan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan ini penelitian mengobservasi kegiatan-kegiatan perekonomian dan situasi lingkungan sekaligus mengamati faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

⁵⁰Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2006), h. 145

b. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.⁵¹ Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.⁵² Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data resmi yang diterbitkan oleh badan pusat statistik.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³ Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh laporan data PDRB, pengeluaran daerah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan

⁵¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), hlm.157.

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm.231.

⁵³Sugiyono. *Op.Cit.* h.174.

variabel dummy sebelum dan sesudah. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel tujuh tahun yaitu dari tahun 2010-2016.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.⁵⁵ Adapun alasan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah data yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung hanya tersedia di atas tahun 2010 dan di bawah tahun 2016.

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, Variabel yang pertama merupakan variabel independen yaitu Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia. Variabel yang kedua adalah variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Variabel ketiga adalah variabel dummy.

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁵⁶

Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang akan diteliti adalah

⁵⁴Wiratna, Sujarweni, *Op.Cit*, h.81.

⁵⁵*Ibid*, h.88.

⁵⁶Sugiyono, *Op.Cit*, h.61.

mengenai pengaruh Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Variabel Dummy terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diambil dari tahun 2010-2016.

2. Variabel Bebas (*Variabel Independen*)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui.⁵⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain :

1. Pengeluaran Daerah (X1)

Pengeluaran Daerah (PD) adalah jumlah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung barat melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditukar dalam rupiah. Dalam penelitian ini menggunakan data pengeluaran daerah Kabupaten Lampung barat tahun 2010 hingga 2016.

2. Jumlah Penduduk (X2)

Jumlah Penduduk (JP) merupakan jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Lampung Barat yang terdaftar di BPS yang diukur dalam satuan jiwa. Jumlah Penduduk yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk dalam periode 2010 hingga 2016.

⁵⁷*Ibid.* h.62.

3. Indeks Pembangunan Manusia (X3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata kesejahteraan suatu negara yang dikur dalam satuan persen. Dalam hal ini adalah IPM periode 2010 hingga 2016.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.⁵⁸ Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran Daerah (PD) adalah jumlah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung barat melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditukar dalam rupiah.
- b. Jumlah Penduduk (JP) merupakan jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Lampung Barat yang terdaftar di BPS (satuan jiwa).
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata kesejahteraan suatu negara yang diukur dalam satuan persen.
- d. Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan dihitung dalam jangka waktu tertentu yang difroksi dengan PDRB ADHK (rupiah).

⁵⁸Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, h.77.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Sumber	Skala Pengukuran
Pengeluaran Daerah (X1)	Perkembangan PD di Kabupaten Lampung Barat	PD yang dibelanjakan pemerintah	BPS	Rasio (Rp)
Jumlah Penduduk (X2)	Perkembangan JP di Kabupaten Lampung Barat	JP keseluruhan Lampung Barat	BPS	Satuan Jiwa
Indeks Pembangunan Manusia (X3)	Perkembangan IPM suatu daerah	Rata-rata kesejahteraan suatu daerah	BPS	Persen
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Perkembangan PDRB	Nilai PDRB	BPS	Rasio (Rp)

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum dan konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.⁵⁹

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari

⁵⁹Sutrisno Hadi, *Metode Reasearch*, (Yogyakarta:ANDI, 2002), h.42.

penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.⁶⁰ Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya digunakan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kolmogorov-smirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *Kolmogorov-smirnov* adalah uji beda antara

⁶⁰Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta:ANDI, 2011), h.177.

data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dengan pengambilan keputusan :

- a) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal
- b) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal⁶¹

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel tersebut, Gejala multikolineritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerence-nya di atas 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 ($VIF < 10$).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian obeservasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Uji autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Autokorelasi dapat dideteksi melalui Uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*First Order Autokorelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (Konstanta) dalam model regresi

⁶¹ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Pers, 2015), h.52-56.

dan tidak adanya variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang diuji adalah :

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicien	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No desicien	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u \leq d < 4 - d_u$

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamata lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas. Cara untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot*. Dasar

analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik plor adalah sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Alat Uji Hipotesis

a. Uji T atau Uji Parsial

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengeruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh pengeluaran daerah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, variabel dummy terhadap pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut :⁶²

- a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

⁶²Santoso Singgih, *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*, (Jakarta: Gramedia,2004), h.168.

b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel *coefficients* kolom sig atau *Significance*.

b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X_0, X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai Berikut :

a) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

b) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.⁶³ Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda maka masing-masing independen yaitu pengeluaran daerah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan variabel dummy secara parsial dan secara simultan mempengaruhi variabel dependen yang dinyatakan dengan R^2 untuk menyatakan koefisien

⁶³Santoso Singih, *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*, (Jakarta:Gramedia, 2004), h.167.

determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan variabel dummy terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan r^2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka, dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel terkait. Angka dari R square di dapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model summary kolom R square.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).⁶⁴ Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran daerah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan variabel dummy

⁶⁴Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), h.241.

sebelum dan sesudah pemekaran terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2010-2016. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Todaro dan Smith serta Mankiw maka fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = f (PD, JP, IPM) \dots\dots\dots (1)$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model persamaan linear berganda (*multiple regression*) dengan spesifikasi model sebagai berikut (Gujarati, 2006:49);

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (2)$$

Selanjutnya untuk mempermudah perhitungan maka kemudian model tersebut diubah dalam bentuk logaritme sehingga persamaan matematisnya menjadi :

$$L_n Y = \alpha + \beta_1 L_n PD + \beta_2 L_n JP + \beta_3 L_n IPM + e \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

Y = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat di proxy oleh PDRB ADHK (rupiah)

a = Bilangan Konstanta / Intercept

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

PD = Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Barat (rupiah)

JP = Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat (jiwa)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia Lampung Barat (persen)

e = Standar error/ variabel pengganggu

5. Uji Beda Paired Sample Test

Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian *pre-post* atau sebelum dan sesudah. Uji beda ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan tertentu satu sampel yang sama pada dan periode pengamatan yang berbeda. *Paired sample test* digunakan apabila data berdistribusi normal.⁶⁵

Paired sample test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.⁶⁶ Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut :

1. Jika t hitung $>$ t tabel dan probabilitas (A.sig) $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika t hitung $<$ t tabel dan probabilitas (A.sig) $>$ 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

⁶⁵ Pramana, Andi, *Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham*, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012). h. 38.

⁶⁶ Widiyanto, *Statistika harapan*, (Jakarta : PT Alex Mediaa Komputindo, 2013).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) di sebelah utara, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus di sebelah selatan, Kabupaten Pesisir Barat di sebelah barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan kabupaten Tanggamus di sebelah timur.

Visi Kabupaten Lampung Barat : Lampung Barat sejahtera dan berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa. Untuk memahami visi pembangunan tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sejahtera : terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan kebudayaan daerah.
- b. Berdaya saing : terwujudnya peningkatan kemampuan dan keunggulan daerah

- c. Iman dan taqwa : terwujudnya masyarakat yang taat kepada tuhan dalam arti mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya serta meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kabupaten lampung barat memiliki 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, harmonis, kesetaraan gender dan mengembangkan kebudayaan daerah.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, kepariwisataan, inovasi teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam serta energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan pendidikan dan iptek kepemudaan serta kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan daya dukung infrastruktur, tata ruang dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan.

2. Sejarah Kabupaten Lampung Barat

Pembentukan Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak tahun 1967, saat diselenggarakannya Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pelajar, mahasiswa dan masyarakat Lampung Barat se-Indonesia. Hasil dari Mubes inilah terbentuklah Panitia nasional dan Panitia Eksekutif.

Mubes juga menghasilkan Sembilan resolusi. Menanggapi resolusi ini, DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Utara menyetujui dan memberikan dukungan moril serta meminta perhatian Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung terhadap resolusi presidium musyawarah Nomor: 01/res/1967 yang menuntut ditingkatkannya eks Kewedanaan Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Dukungan DPRD Lampung Utara tersebut tertuang dalam suratnya yang ditujukan Kepada Bupati daerah Tingkat II Lampung Utara tertanggal 20 April 1967 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan.

Tanggal 11 Juli 1967 DPRD Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 30/II/DPRD/67 tentang Peningkatan Eks Kewedanaan menjadi Tingkat II Lampung Barat. Isi keputusan tersebut adalah menerima tuntutan masyarakat eks kewedanaan Keui menjadi tingkat II Kabupaten Lampung Barat. Perjuangan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (KPM) dan masyarakat Lampung Barat tersebut menjadi dasar pertimbangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara dalam sumbang sarannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung mengenai calon ibukota eks Kewedanaan Krui yang tertang dalam suratnya Nomor PU.000/1232/Bank.LU/1978 tertanggal 27 September 1978.

Sebelum resmi menjadi daerah yang definitif, Lampung Barat merupakan wilayah pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Liwa yang beribukota di Liwa. Hal ini berKeppmendagri Nomor 114/1978 tentang

Pembentukan wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kota Agung, dan Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Liwa dan Menggala. Tahun 1991 keluarlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17/991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang No.6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991. Kabupaten ini merupakan salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Barat dikenal dengan julukan skala beghak. Skala beghak adalah kawasan yang sampai kini dapat disaksikan warisan peradabannya. Kawasan ini adalah kawasan yang sudah hidup sejak masa prasejarah.

3. Geografis dan Topografi Kabupaten Lampung Barat

Setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas wilayah provinsi Lampung dan mempunyai Garis pantai sepanjang 260 km, Kabupaten Lampung Barat memiliki Luas wilayah $\pm 3368,14 \text{ km}^2$. Kabupaten Lampung Barat terletak pada kordinat $4^{\circ}47',16'' - 5^{\circ}56',42''$ lintang selatan dan $103^{\circ}35',08'' - 104^{\circ}33',51''$ Bujur Timur. berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Lampung Barat berkisar antara 2500-3000 milimeter setahun.

Secara topografi, Kabupaten Lampung Barat memiliki tiga bentuk topografi lahan, yaitu: (1) Topografi Dataran Rendah memiliki ketinggian 0 – 600 meter dari permukaan laut; (2) Topografi Perbukitan mempunyai

ketinggian 600 – 1000 meter dari permukaan laut. Daerah ini umumnya terdapat di kecamatan Balik Bukit dan Sumber Jaya; (3) Topografi Pegunungan mempunyai ketinggian 1000 – 2000 meter dari permukaan laut. Sebagian kecamatan Balik Bukit dan Sumber Jaya, serta sebagian besar wilayah Kecamatan Belalau terletak pada topografi daerah pegunungan ini.

Seiring dengan dinamika pemerintah dan perkembangan masyarakat, maka pada tanggal 15 April 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar Negeri Suoh, Lumbok Seminung, Way Kruai dan Kruai Selatan, sehingga Kabupaten Lampung Barat sampai saat ini memiliki 25 wilayah administrasi kecamatan. Setelah adanya pemekaran daerah Otonomi Baru yaitu Pesisir Barat yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat maka kini wilayah Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan.

4. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Kondisi geografis Lampung Barat yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan serta lautan yang luas menjadikan Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari pemandangan alamnya yang penuh pesona juga produk hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sumber daya alam ini sangat potensial sebagai bahan baku

industri dan jika dilakukan penanganan pasca panen yang baik, dapat menjadi komoditas ekspor dalam bentuk bahan mentah (*raw material*).

Dalam bidang pertanian khususnya hortikultura, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil sayur mayor terbesar di Provinsi Lampung. Lampung Barat juga memiliki klimatologi yang sesuai untuk budidaya berbagai jenis tanaman hias. Penduduk Kabupaten Lampung Barat sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (82,44%). Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi pada sektor pertanian untuk dikembangkan dan sektor tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian.

B. Analisis data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh berdasarkan metode sampel yaitu *Purposive Sampling*. Dari hasil olah data yang dilakukan dapat dijelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi berganda. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia.

a. Perkembangan Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Dampak Pemekaran Wilayah

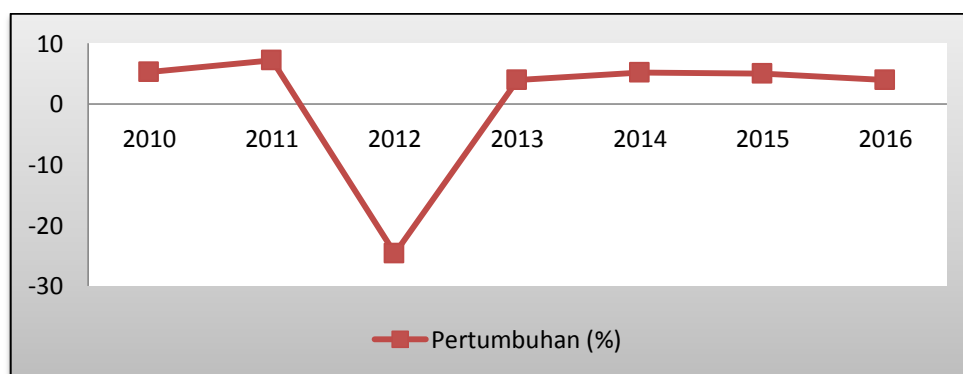
Tabel 4.1
Pengeluaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Tahun	Pengeluaran Daerah (PD) (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	4.578.369,92	-
2011	4.907.703,07	5,24
2012	3.698.307,30	7,19
2013	3.845.234,99	-24,64
2014	4.043.134,12	3,97
2015	4.244.864,99	5,15
2016	4.398.559,44	4,99

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas pengeluaran daerah Kabupaten Lampung Barat setelah mengalami pemekaran wilayah menurun drastis pada tahun dilakukannya pemekaran wilayah yaitu dari 4.907.703,07 (juta rupiah) menjadi 3.698.307,30 (juta rupiah). Kemudian meningkat kembali pada tahun 2013 dengan pengeluaran sebesar 3.845.234,99. Namun, untuk tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan.

Gambar 4.1
Pertumbuhan Pengeluaran Daerah (PD) Kabupaten Lampung Barat



b. Perkembangan Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat sebagai Dampak Pemekaran Wilayah

Penduduk adalah populasi manusia yang menempati area atau wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang berada dalam suatu wilayah terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinyu. Penduduk merupakan suatu hal yang sangat penting karena merupakan modal dasar dalam pembangunan dan perekonomian suatu wilayah. Penduduk juga termasuk bagian dari perekonomian karena penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan menyediakan tenaga kerja. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu penelitian pada table 4.3.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat

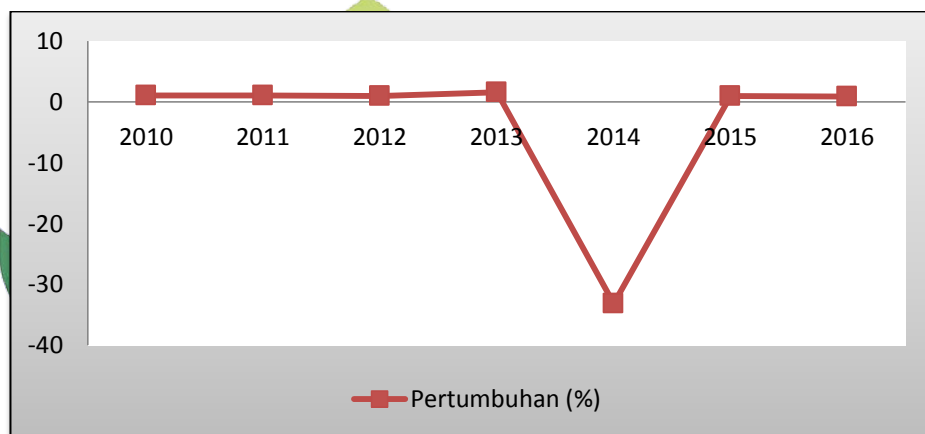
Tahun	Jumlah Penduduk (JP) (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2010	419.027	1,07
2011	423.586	1,09
2012	427.773	0,99
2013	434.473	1,57
2014	290.387	-33,16
2015	293.105	0,94
2016	295.689	0,88

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu penelitian 2010-2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk sebelum pemekaran yaitu tahun 2010-2013 cenderung meningkat. Namun, pada

tahun 2014 jumlah penduduk menurun drastis. Hal ini dikarenakan pemekaran wilayah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012, kemudian baru diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Sehingga pada tahun 2014 barulah terjadi penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2010 s/d tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 4.2
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat



Berdasarkan Gambar tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat selama periode 2010 s/d 2016 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,57%, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun setelah dilakukannya pemisahan Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar minus 33,16%.

c. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Barat sebagai Dampak Pemekaran Wilayah

Konsep dari pembangunan manusia seutuhnya adalah konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental, maupun secara spiritual. Bahkan disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga manusia dapat dikatakan sebagai modal utama daya saing nasional.

Tabel 4.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat

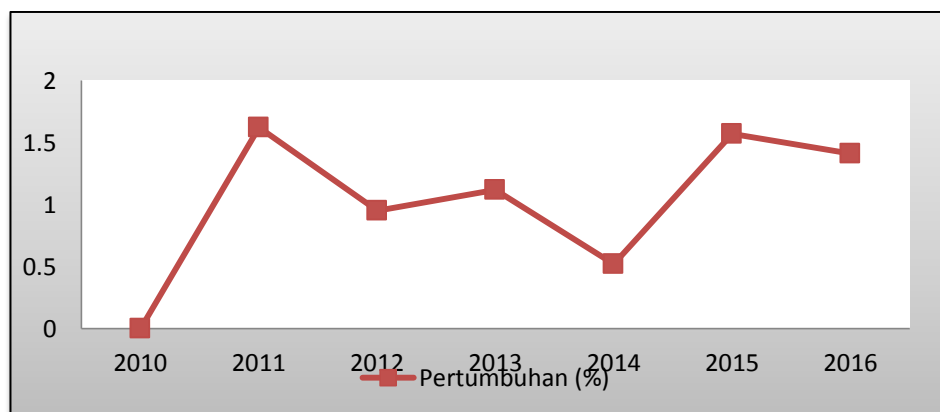
Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pertumbuhan (%)
2010	60,93	-
2011	61,92	1,62
2012	62,51	0,95
2013	63,21	1,12
2014	63,54	0,52
2015	64,54	1,57
2016	65,45	1,41

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui pencapaian IPM Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2010 s/d 2016 cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. UNDP menyatakan bahwa IP dikelompokkan menjadi empat klasifikasi, yaitu low (IPM < 50), lower-medium (50 – 65,99), upper-medium (IPM 66-79,99) dan high (IPM keatas). Berdasarkan data IPM Kabupaten Lampung Barat selama tahun

2010 s/d 2016 dihasilkan rata-rata IPM sebesar 63,16 sehingga IPM Kabupaten Lampung Barat berada pada kategori IPM Lower-medium.

Gambar 4.3
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Barat



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM yang tertinggi selama periode 2010 s/d 2013 yaitu sebesar 1,57 % terjadi pada tahun 2011. Sedangkan pertumbuhan IPM yang terendah terjadi pada tahun 2014. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Barat fluktuatif naik turun.

d. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebagai Dampak Pemekaran Wilayah

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya PDRB sangat menentukan maju mundurnya suatu perekonomian. Perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lampung Barat (2010 s/d 2016) dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lampung Barat

Tahun	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	4.941.599,56	-
2011	5.271.084,83	6,26
2012	3.440.998,92	-34,72
2013	3.677.316,36	6,87
2014	3.881.888,10	5,56
2015	4.088.443,37	5,32
2016	4.293.142,38	5,01

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat menggunakan data PDRB ADHK. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -34,72 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Kemudian, meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 6,87%. Pada tahun 2013 merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama periode penelitian ini. Namun, seperti yang dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya sebesar 5,56%.

2. Hasil Uji Beda

Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah digunakan uji paired sample test menggunakan data PDRB ADHK Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Tabel 4.5
Paired Sample Test

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	SEBELUMPEMEKARAN – SETELAHPEMEKARAN	1.583	5.648	1.630	-2.005	5.172	.971	11	.352

Sumber : Data diolah 2018

Pengambilan keputusan dalam Uji Paired sampel t-test terjadi jika berdasarkan hasil diperoleh dan menunjukkan nilai sebagai berikut :

1. Jika nilai sig. (2-tailed > 0.05), maka tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Jika nilai sig. (2-tailed < 0.05), maka terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil dari tabel 4.5 diatas, nilai signifikansi 0.352 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data yang akan diuji sebelumnya harus memenuhi persyaratan normalitas, pengujian yang digunakan adalah uji *One Sample*

Kolmogrov-smirnov. Data yang dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *kolmogrov-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.4616041
	Std. Deviation	3.72162170
Most Extreme Differences	Absolute	.311
	Positive	.230
	Negative	-.311
Kolmogorov-Smirnov Z		.822
Asymp. Sig. (2-tailed)		.509

Sumber : Data diolah, 2018

Hasil uji normalitas pada tabel 4.6 diatas dengan menggunakan metode *one sample kolmogrov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen pada jumlah (N) sebesar 7 adalah 0.509. Berarti data dari penelitian ini berdistribusi normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0.509 > 0.05$. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

b. Uji Multikolinearitas

Penelitian ini dilakukan terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) harus berada di angka 10, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
Beta				
	-1.538	.222		
.947	32.246	.000	.840	1.191
.037	.874	.446	.407	2.457
-.149	-3.416	.042	.381	2.624

Sumber : Data diolah 2018

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai VIF dan nilai *tolerance*. Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan *Variance Inflation*

Factors (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji Durbin Watson (DW) berikut ini :

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.998	.996	.01017	2.443

Sumber : Data diolah 2018

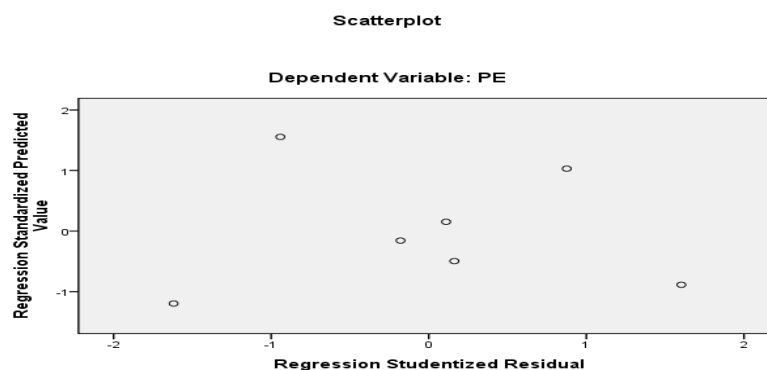
Pada tabel 4.8 diatas dapat diketahui nilai durbin Watson (d) sebesar 2.391 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan signifikansi sebesar 5 %. Jumlah sampel (n) 7 dan jumlah variabel independen (k) adalah 3. Maka dari tabel di dapat nilai $d_u = 1.8964$, dan nilai $d_l = 0.4672$. oleh karena nilai $4-d_l \leq d \leq 4-d_l$ atau $4- 1.8964 \leq 2.443 \leq 4-0.4672$ maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *Variance* dan *Residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data yang mengumpul hanya pada diatas atau dibawah saja, penyebaran data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 4.4 sebagai berikut :

Gambar 4.4
Heteroskedastisitas



Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji T

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.920	1.899		-1.538	.222
PD	1.432	.044	.947	32.246	.000
JP	.028	.032	.037	.874	.446
IPM	-.974	.285	-.149	-3.416	.042

Sumber : Data diolah 2018

Uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel Pengeluaran Daerah dengan t hitung sebesar 32.246

dan t tabel sebesar 2.77645 $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($32.246 > 2.77645$) atau nilai signifikan lebih kecil dari alpa 0.05 % ($0.000 < 0,05$).

Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel Jumlah Penduduk, dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.874 < 2.77645$) atau nilai signifikan lebih besar dari alpa 0.05 % ($0.446 > 0.05$).

Variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel Indeks Pembangunan Manusia, dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3.416 < 2.77645$) atau nilai signifikan ($0.042 < 0.05$).

b. Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari PD, JP dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat secara bersama-sama. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5%.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.143	3	.048	459.466	.000 ^a
Residual	.000	3	.000		
Total	.143	6			

Sumber : Data diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui hasil uji signifikan simultan (Uji F) diatas menunjukkan nilai sig. $0.000 < 0.05$, dan nilai F hitung $459.466 > F$ tabel 6.94. Hal ini menunjukkan bahwa :

- a) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b) Jika probabilitas $> 0,05$ maka h_0 diterima

Sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena probabilitas $0.000 < 0.05$.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.998	.996	.01017

Sumber : Data diolah 2018

Dari tabel 4.11 dapat dianalisis pengaruh variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi Adjusted R Square sama dengan 0,996 yang artinya adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 99.60 % sedangkan sisanya 0.40 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terkait (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat periode 2010-2016. Formulasi Persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-2.920	1.899	
PD	1.432	.044	.947
JP	.028	.032	.037
IPM	-.974	.285	-.149

Sumber : Data diolah 2018

$$Y = 2.920 + 1.432 X1 + 0.028 X2 - 0.974 X3 + e$$

Dimana : a = Konstanta

X1 = Pengeluaran Daerah

X2 = Jumlah Penduduk

X3 = Indeks Pembangunan Manusia.

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 2.920 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 2.920 satuan.
- Koefisien regresi variabel pengeluaran daerah sebesar 1.432 menunjukkan bahwa jika variabel pengeluaran daerah meningkat satu

satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1.432 satuan dengan ketentuan variabel lainya konstan.

- c. Koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar 0.028 menunjukkan bahwa jika variabel jumlah penduduk meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.028 satuan dengan syarat variabel lainya konstan.
- d. Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.974 menunjukkan bahwa jika variabel Indeks Pembangunan Manusia meningkat satu satuan maka variabel jumlah penduduk akan mengalami peningkatan sebesar 0.974 satuan dengan ketentuan variabel lainya konstan.

C. Pembahasan

1. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat

Pertumbuhan ekonomi juga sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang diukur dengan nilai PDRB/kapita. Daerah yang lebih sejahtera umumnya memiliki PDRB/kapita yang lebih tinggi. PDRB/kapita dihitung dengan cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi

0.352 > 0.05, sehingga H_{01} diterima dan H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa setelah pelaksanaan pemekaran pertumbuhan ekonomi tidak lebih baik dibanding masa sebelum pemekaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Khalid (2012) pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah DOB juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Namun perlu dilihat pula apakah kenaikan nilai PDRB/kapita beserta tingkat pertumbuhannya dapat benar-benar menunjukkan bahwa proses pemekaran wilayah juga berdampak kepada distribusi kesejahteraannya. Jika pendapatan yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang baik tidak diikuti dengan kemerataannya, maka sebenarnya pembangunan belum dikatakan berhasil.

2. Pengaruh pengeluaran daerah, jumlah penduduk, IPM, sebelum dan sesudah pemekaran wilayah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat

a. Pengaruh pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat

Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran lancar dan pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya di keluarkan untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang sifatnya menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan lagi menjadi pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel pengeluaran daerah sebesar 0.000 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi α (0,05), menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan taraf signifikansi ($0.000 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran daerah

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat Lampung periode 2010-2016.

Koefisien regresi variabel pengeluaran daerah sebesar 1.432 menunjukkan bahwa jika variabel pengeluaran daerah meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1.432 satuan dengan ketentuan variabel lainya konstan.

Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Zahari yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pengeluaran pemerintah ditunjukan untuk kegiatan pembangunan ekonomi suatu daerah sehingga dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula sejalan dengan teori yang di kemukakan Rostow dan Musgrave dimana dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara tahapan pembangunan ekonomi dengan tahapan pengeluaran pemerintah.

Tahapan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap awal, menengah dan lanjutan. Pada waktu tahap awal pertumbuhan ekonomi dibutuhkan porsi investasi yang besar dari pemerintah. Dalam tahap ini investasi tersebut akan dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada bidang yang dinilai penting. Pada tahap menengah dibutuhkan investasi dari sektor pemerintah dan sektor swasta dan pada tahap lanjutan, aktivitas pemerintah berubah

dari penyediaan prasarana ke aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan dan lainnya.

Jadi teori hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan oleh Rostow dan Musgrave dan penelitian yang dilakukan oleh M.Zahari dan Achmad Sjafii berlaku dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Dimana dikatakan oleh M.Zahari dan Achmad Sjafii bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan ekonomi maupun konsumsi pemerintah lokal yang mempunyai peran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikannya di bidang pembangunan manusia seperti pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia Hadji Ali yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki pengaruh yang tidak signifikan di Provinsi Manado serta di dukung oleh penelitian yang dilakukan Syaifuddin yang menyatakan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Pengeluaran daerah Kabupaten Lampung Barat setelah mengalami pemekaran wilayah menurun drastis pada tahun dilakukannya pemekaran wilayah yaitu dari 4.907.703,07 (juta

rupiah) menjadi 3.698.307,30 (juta rupiah). Kemudian meningkat kembali pada tahun 2013 dengan pengeluaran sebesar 3.845.234,99. Namun, untuk tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan.

Peningkatan pengeluaran daerah tersebut disebabkan untuk memenuhi kelengkapan aparatur pemerintah seperti belanja pegawai guna menunjang dan memperlancar tugas, kerja dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu pengeluaran daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.

b. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat

Penduduk termasuk bagian penting dalam perekonomian karena penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan menyediakan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif dan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik.

Berdasarkan hasil pengujian regresi variabel Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel Jumlah Penduduk, dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.874 < 2.77645$) atau nilai signifikan lebih besar dari alpa

0.05 % ($0.446 > 0.05$). Koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar 0.028 menunjukkan bahwa jika variabel jumlah penduduk meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.028 satuan dengan syarat variabel lainnya konstan.

Hal ini salah satu penyebabnya karena jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat tidak semua berasal dari Kabupaten Lampung Barat itu sendiri, melainkan dari luar Kabupaten Lampung Barat, dan sebagian bekerja atau ditempatkan tidak sesuai dengan pendidikan dan keterampilan masing-masing, sehingga dikatakan jumlah penduduk berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu penelitian 2010-2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk sebelum pemekaran yaitu tahun 2010-2013 cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2014 jumlah penduduk menurun drastis. Hal ini dikarenakan pemekaran wilayah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012, kemudian baru diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Sehingga pada tahun 2014 barulah terjadi penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat.

Dalam pandangan Ravenstein migrasi (proses mobilitas penduduk) ini terjadi secara spasial dan relatif permanen. Akan tetapi ia berpandangan bahwa dalam situasi ekonomi yang terus berkembang dan disertai dengan meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik, arus mobilitas penduduk cenderung menunjukkan

gerak yang sifatnya berulang-ulang. Mobilitas semacam ini banyak terjadi antara daerah kota yang pekerja-pekerjaannya berulang alik dari tempat tinggal ke tempat kerjanya yang dilakukan secara terus menerus.

Lewis dengan hasil studinya tentang mekanisme mobilitas tenaga kerja dari sektor pedesaan yang subsisten ke sektor perkotaan yang mempunyai tingkat upah yang lebih tinggi. Dia menganggap bahwa daerah pedesaan yang surplus (dan bahkan produk marjinalnya bisa dikatakan nol) akan berpindah ke daerah pusat industri atau perdagangan yang membutuhkan tenaga kerja.⁶⁷

Dampak negatif dari terjadinya migrasi yaitu terjadinya tingkat migrasi yang tidak seimbang (antara migrasi masuk dan migrasi keluar). Selain itu jika terjadi berbagai masalah kependudukan lain terkait berlebuhnya jumlah urban di suatu kota akibatnya pembangunan suatu daerah terhambat dan produktivitas menurun karena minimnya tenaga kerja produktif karena penduduk yang melakukan migrasi dari desa ke kota tersebut tidak cukup berkualitas. Akibatnya mereka malah menambah beban bagi kota-kota yang didatangi berupa kemacetan lalu lintas, kekumuhan, kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai prasarana seperti air minum, listrik dll.

⁶⁷Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014), h.174.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafika Mokodompis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.”⁶⁸ Todaro juga menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut.⁶⁹

c. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan

⁶⁸ Rafika Mokodompis, *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado*, (Jurnal, 2012).

⁶⁹ Todaro, 2000. *Ekonomi Pembangunan*, diterjemahkan oleh Haris Munandar. Edisi kelima. Bumi Aksara Jakarta.

meningkatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan *human capital* (sumber daya manusia) dalam rangka untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi hingga pada titik yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Variabel Indeks Pembangunan Manusia, dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3.416 < 2.77645$) atau nilai signifikan ($0.042 < 0.05$). Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.974 menunjukkan bahwa jika variabel Indeks Pembangunan Manusia meningkat satu satuan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0.974 satuan dengan ketentuan variabel lainya konstan.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau IPM. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber

pertumbuhan ekonomi. Namun, pada penelitian ini IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sangat sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of allaviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan).

Pada dasarnya ideologi pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pada firman-firman Allah SWT yang termasuk ayat-ayat tentang konsep memakmurkan bumiNya, yang mana pertumbuhan ekonomi telah ada

dalam wacana pemikiran muslim klasik, yang dibahas dalam pemakmuran bumi yang merupakan pemahaman dari firman Allah dalam Qur'an Surah Hud ayat 61:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ
هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

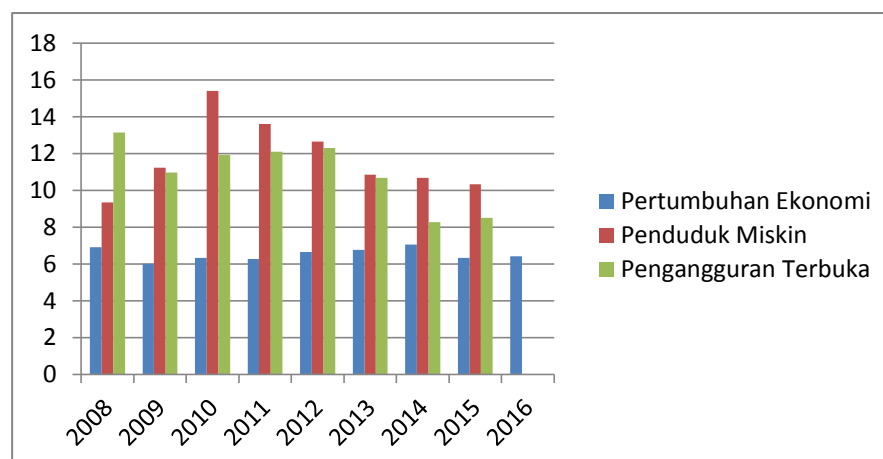
Berdasarkan ayat di atas, artinya menjadikan kamu sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Tidak heran apabila Allah SWT telah menciptakan seluruh apa yang ada di atas permukaan bumi ini semata-mata hanya diperuntukan untuk memenuhi keperluan anak cucu nabi Adam AS, karena Allah SWT Maha Tahu dan menganggap manusialah yang layak untuk memakmurkan.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam adalah sama dengan konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat dalam perhitungan GNP. PDB atau PDRB dalam pembahasan ekonomi Islam dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan perkapita masyarakat yang menjadi parameter *Falah* didalamnya.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa total PDRB Kabupaten Lampung Barat berfluktuatif. Pada sisi lain, Islam juga memandang pentingnya pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya pendapatan perkapita tinggi, tetapi berbeda dengan kondisi riil, kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan tetap tinggi. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5
Grafik Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008-2016



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 (Data Diolah)

Berdasarkan gambar 4.5 di atas, dapat dijelaskan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Barat tahun 2008-2016 masih berfluktuatif. Dimana pada tahun 2008-2010 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 9,36 persen menjadi 15,42 persen, sedangkan pada tahun 2011-2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 12,65 persen menjadi 10,33 persen. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dari tahun 2011-2015, namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi masih tidak selalu diiringi dengan menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksignifikan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin yang dilihat berdasarkan data BPS. Hal ini juga disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Karl Max yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang semakin timpang. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: *“harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk dari beberapa negeri adalah untuk Allah, Rosul, kerabat (Rosul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rosul kepada kamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya”*.

Ayat di atas menekankan perintah untuk mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang yang mengalami kekurangan harta, karena Islam tidak menghendaki terkonsentrasinya harta hanya kepada orang-orang kaya saja, tetapi harus merata.

Perbedaan mendasar dari pertumbuhan ekonomi konvensional dan pertumbuhan ekonomi Islam yaitu terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata dari *output* yang dihasilkan yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi yang pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia, sedangkan ilmu ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (*duniawi*) dan kepuasan batin (*ukhrawi*).

Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani,

Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, haruslah ada sasaran yang dicapai. Diantaranya meningkatkan persediaan dan memperluas pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup misalnya makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan. Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia.

Konsumsi rumah tangga tergantung pada pendapatan, semakin besar pendapatan akan semakin besar juga konsumsinya dan kemudian sisanya di tabung. Dalam ekonomi Islam fungsi konsumsi terikat pada prinsip yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa hakekat kepemilikan bagi seseorang ialah apa yang dimakan dan yang dikeluarkan zakat, infak dan sedekah. Karena seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuk’lah beserta orang-orang yang ruku’”* .(Q.S Al- Baqarah : 43)

Dalam penjelasan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan setiap hambanya untuk membayar zakat dengan patuh. Hal ini berkaitan dengan pengoptimalan keuangan publik. Apabila masyarakat bertanggung jawab dan patuh dalam membayar pajak maupun zakat maka penerimaan pemerintah

yang didedikasikan guna pembangunan ekonomi dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji beda *paired t-test* nilai signifikansi $0.352 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah pemekaran wilayah.
2. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, dan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t-statistik dengan t-tabel yang dilakukan menggunakan SPSS.17 yaitu t-tabel sebesar 2.77645, sedangkan t-statistik variabel Pengeluaran Daerah = (1.432), Jumlah Penduduk = 0.028), dan IPM = (-0,974).
3. Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan sehingga dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Sedangkan, Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi yang optimal itu sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa serta mempunyai orientasi ganda

dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).

B. Saran

1. Perlunya pemerintah memperhatikan masalah yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama indeks pembangunan manusia agar dapat lebih ditingkatkan.
2. Dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini agar bervariasi serta sebagai masukan bagi peneliti lainnya tentang pengaruh indeks pembangunan manusia jumlah penduduk, dan pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar, A, *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Singkil* (Tesis, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2006).
- Anonim. Enam Alasan Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom. <http://phylopop.com>. 2012. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 14.00 WIB
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM Yogyakarta, 2010).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2016, *Lampung Barat Dalam Angka (LBDA)*, Liwa.
- Bappeda Kabupaten Lampung Barat, 2016, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung Barat*, Liwa.
- Darmawan, Nazara, S., Jackson, D., Ahmad, T. dan Purwanto, D.A. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *United nations Development Programme (UNDP)*. 2008. <http://undp.or.id>. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.30 WIB.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat*, (Jakarta:Gramedia, 2011), h.1062
- Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi* (Yogyakarta : UII Press, 2006) h. 160.
- Gulo, M.R. Memahami dengan Benar Tujuan Pemekaan. <http://niasbaratwordpress.com>. 2007. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 14.30 WIB.
- Halim Abdul, Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012).
- Harmantyo, Dj. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah, dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia, <http://geografi.ui.ac.id>. 2011. Diakses tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB.
- Inu Kencana Syafie, Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 112.

- Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edke-10, Cet ke-10. Terjemahan dari Judul Asli “The Economics of Debelopment and Planning”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97.
- Junawi Hartasi Saragih, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Studi Komparatif : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat)”. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), h.76.
- Kamus besar bahasa Indonesia” (On-line), tersedia di <http://kbbi.web.id/arti-kata/analisis.html> di akses pada kamis 22 maret 2018 : 13.00 Wib.
- Kamus besar bahasa Indonesia” (On-line), tersedia di <http://kbbi.web.id/arti-kata/dampak.html> di akses pada kamis 22 maret 2018 : 13.00 Wib.
- Kaputra, Iswan dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 208.
- Khairullah, “Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat”. *Jurnal Ekonomi Pembangua*, Vol. 11 No. 3 (3 Desember 2006), h. 261-277.
- Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta:ANDI, 2011. h. 177.
- Maiharyanti, Eva, "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam", Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2010)
- Mankiw, N. G. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000. h 174.
- Marbun, B.N, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,2010. h. 109.
- Murniati 2017. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Perkapita di Kabupaten Kerinci. J.mas vol 2 No 1.
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*,. Jakarta:Bumi Aksara, 2007. h. 47.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Pramana, Andi, *Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham*, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012). h. 38.

Pressman, Steven, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 155.

Ruslan Abdul Ghofur Noor. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013. h. 62-63.

Salvatore, D. *Ekonomi Internasional*. Ed-ke-5, Cet ke-1, Terjemahan dari judul Asli "International Economies". Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1997.

Santoso Singgih. *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*. Jakarta:Gramedia, 2004. h.167.

Saragih, J.P. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* . Jakarta: Halia Indonesia, 2003.

Sardi, Analisis Pengaruh Pengeluaran dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh, (Medan : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2012).

Sasana, H. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomidi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 10. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Setiawan, Iwan, "Analisis Akses Desa-Desa di Kabupaten Bandung Terhadap sumber-SumberProduktif". (Laporan Penelitian UNPAD, Bandung, 2006).

Suahasil Nazara, "Ukuran Optimal Pemerintah daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Dalam era Desentralisasi". *Jurnal ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol.VII No. 02 (Januari 2007), h. 129-157.

Sugiyono. *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-15*. Bandung: Alfabeta. h. 14.

-----, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-15*. Bandung: Alfabeta. h. 61.

------. *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-15*. Bandung: Alfabeta. h. 174.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006. h. 13.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006. h. 231.

Sukirno, S. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006. h 423.

Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta : ANDI, 2002. h. 42.

Todaro, M.P., dan Smith, S. C. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Bab 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 2 Ayat (3).

Usman, Husnaini dan Setiadi. *Pengantar Statistika*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003. h. 241.

Widiyanto, *Statistika harapan*, (Jakarta : PT Alex Mediaa Komputindo, 2013).

Wiratna, Sujarweni. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015. h. 52-56.

Wiranata, Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014. h. 75.

Wiratna, Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015. h. 157.

Yusnani, Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: CV. Cita Intrans Laras Wisma Kalimetro 2016. h. 7.

**Data Pengeluaran Daerah dan Pertumbuhan Pengeluaran daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2016 (juta rupiah)**

Tahun	Pengeluaran Daerah (PD) (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	4.578.369,92	-
2011	4.907.703,07	5,24
2012	3.698.307,30	7,19
2013	3.845.234,99	-24,64
2014	4.043.134,12	3,97
2015	4.244.864,99	5,15
2016	4.398.559,44	4,99

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah).

**Data Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2016
(dalam jiwa)**

Tahun	Jumlah Penduduk (JP) (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2010	419.027	1,07
2011	423.586	1,09
2012	427.773	0,99
2013	434.473	1,57
2014	290.387	-33,16
2015	293.105	0,94
2016	295.689	0,88

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017 (diolah).

**Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2010 = 2016**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pertumbuhan (%)
2010	60,93	-
2011	61,92	1,62
2012	62,51	0,95
2013	63,21	1,12
2014	63,54	0,52
2015	64,54	1,57
2016	65,45	1,41

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah)

**Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lampung Barat
(Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	4.941.599,56	-
2011	5.271.084,83	6,26
2012	3.440.998,92	-34,72
2013	3.677.316,36	6,87
2014	3.881.888,10	5,56
2015	4.088.443,37	5,32
2016	4.293.142,38	5,01

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017 (diolah)

Hasil Uji Beda

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 SEBELUMPEME KARAN – SETELAHPEME KARAN	1.583	5.648	1.630	-2.005	5.172	.971	11	.352

Hasil Uji Beda Pertumbuhan Ekonomi



Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 SEBELUMPEM EKARAN – SESUDAHPEM EKARAN	-11.44500	19.36212	9.68106	-42.25445	19.36445	-1.182	3	.322

Hasil Uji Beda Pengeluaran Daerah

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 SEBELUMPEM EKARAN – SESUDAHPEM EKARAN	.34750	1.13227	.56614	-1.45420	2.14920	.614	3	.583

Hasil Uji Beda Jumlah Penduduk

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 SEBELUMPEM EKARAN – SESUDAHPEM EKARAN	97.80125	75.53516	37.76758	-22.39205	217.99455	2.590	3	.081

Hasil Uji Beda IPM

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 SEBELUMPEM EKARAN – SESUDAHPEM EKARAN	-2.04250	.30226	.15113	-2.52346	-1.56154	-13.515	3	.001

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.4616041
	Std. Deviation	3.72162170
Most Extreme Differences	Absolute	.311
	Positive	.230
	Negative	-.311
Kolmogorov-Smirnov Z		.822
Asymp. Sig. (2-tailed)		.509

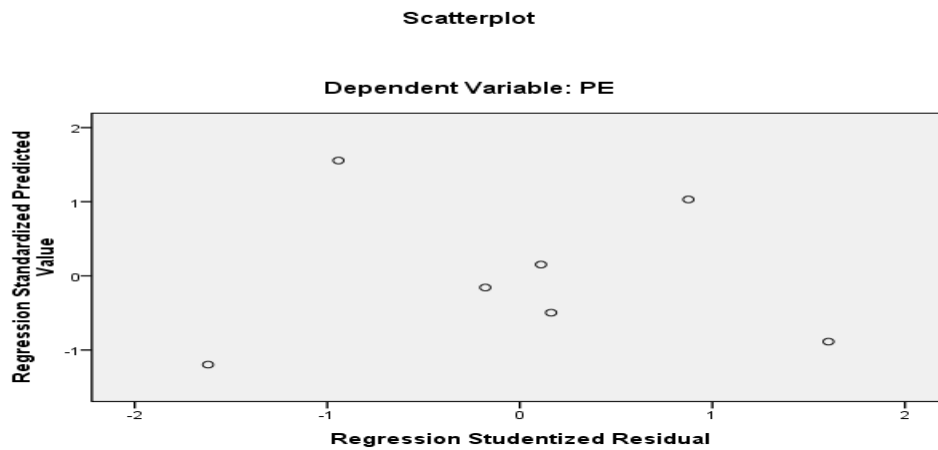
Uji Multikolinearitas

Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
Beta				
	-1.538	.222		
.947	32.246	.000	.840	1.191
.037	.874	.446	.407	2.457
-.149	-3.416	.042	.381	2.624

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.998	.996	.01017	2.443

Uji Heteroskedatisitas



Uji T



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.920	1.899		-1.538	.222
	PD	1.432	.044	.947	32.246	.000
	JP	.028	.032	.037	.874	.446
	IPM	-.974	.285	-.149	-3.416	.042

a. Dependent Variable: PE

Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.143	3	.048	459.466	.000 ^a
Residual	.000	3	.000		
Total	.143	6			

a. Predictors: (Constant), IPM, PD, JP

b. Dependent Variable: PE

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.998	.996	.01017

a. Predictors: (Constant), IPM, PD, JP

b. Dependent Variable: PE

Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-2.920	1.899	
PD	1.432	.044	.947
JP	.028	.032	.037
IPM	-.974	.285	-.149

